



RENJA 2024



RENCANA KERJA TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan karunia-Nya lah Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, selanjutnya Renja SKPD menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang Tahun 2024 ini disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkompeten.

Semarang, 3 Juli 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kota Semarang



Drs. Ulfi Imran Basuki, M.Si

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.....	28
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.....	355
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	48
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG.....	499
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	499
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.....	522
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG.....	566
BAB V PENUTUP	755

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

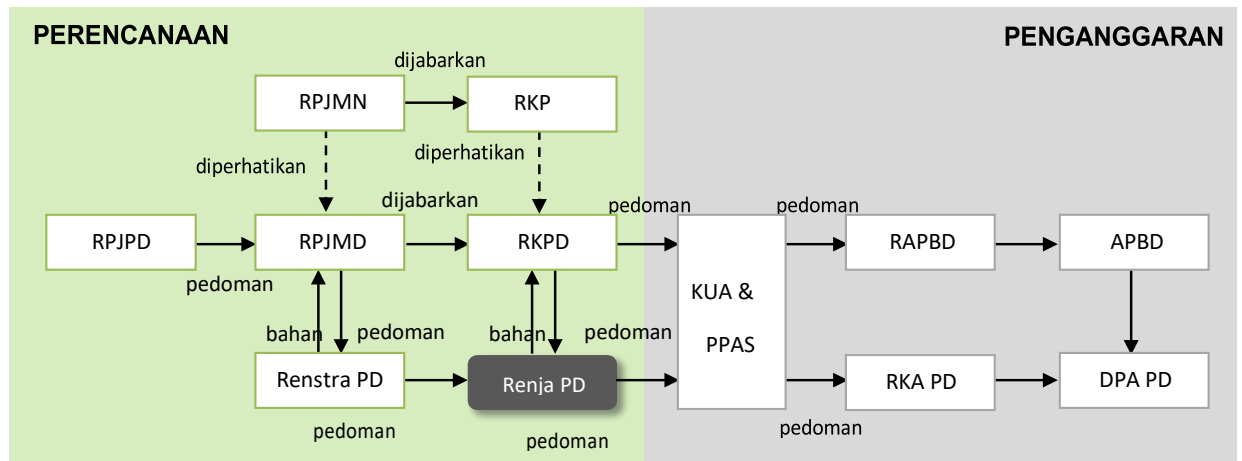
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi

antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2024 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun

2011-2031;

- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Walikota Semarang, Nomor 101 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;

- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja OPD Kota Semarang tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2022. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2022 OPD melaksanakan sebanyak 9 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 16.539.046.532. Dalam pelaksanaannya dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 15.055.880.729 atau sebesar 91,03%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Tabel 2. 1**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023****Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (2022)	Realisasi Renja PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (DP3A)	N/A	N/A	100%	100% (20%)	100	100%	50% (10%)	30

		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (DP3A)	N/A	N/A	100%	100% (20%)	100	100%	50% (10%)	30
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (DP3A)	N/A	N/A	100%	100% (20%)	100	100%	50% (10%)	30
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	N/A	N/A	27 dok	27 dok (20%)	100	100%	50% (10%)	30
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	N/A	N/A	100%	100% (20%)	100	100%	50% (10%)	30
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur	N/A	N/A	100%	100% (20%)	100	100%	50% (10%)	30
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	N/A	N/A	100%	100% (20%)	100	100%	50% (10%)	30
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	N/A	N/A	100%	100% (20%)	100	100%	50% (10%)	30

2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	N/A	N/A	100%	100% (20%)	100	100%	50% (10%)	30
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset dinas	N/A	N/A	100%	100% (20%)	100	100%	50% (10%)	30
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									
		Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	N/A	N/A	100%	100% (20%)	100	100%	58,11% (11,62%)	31,62
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	N/A	N/A	88 Program	93 Program (20%)	105,68	93 Program	93 Program (20%)	40
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi perempuan	N/A	N/A	100%	100% (20%)	100	N/A	N/A	20

	Kewenangan Kabupaten/Kota									
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	N/A	N/A	30 Lembaga	32 Lembaga (20%)	106,66	31 Lembaga	15 Lembaga (9,6%)	29,6
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									
		Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	N/A	N/A	15,64 Point	25,64 Point (20%)	162,78	14,24 Point	12,42 Point (17,44%)	37,44
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan	N/A	N/A	4 Kegiatan	5 Kegiatan (20%)	125	4 Kegiatan	2 Kegiatan (10%)	30
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	N/A	N/A	100%	100% (20%)	100	N/A	N/A	20

2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang terstandarisasi	N/A	N/A	100%	100% (20%)	100	N/A	N/A	20
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									
		Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	N/A	N/A	100%	100% (20%)	100	100%	50% (10%)	30%
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan peningkatan kualitas keluarga	N/A	N/A	100%	100% (20%)	100	N/A	N/A	20
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi penguatan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	N/A	N/A	100%	100% (20%)	100	N/A	N/A	20

2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender	N/A	N/A	100%	100% (20%)	100	100%	60% (12%)	32%
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK									
		Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	N/A	N/A	100%	100% (20%)	100	100%	68,75% (13,75%)	33,75
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	N/A	N/A	2 Kegiatan	2 Kegiatan (20%)	100	2 Kegiatan	1 Kegiatan (10%)	30
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)									
		Cakupan Pemenuhan Hak Anak	N/A	N/A	100%	100% (20%)	100	100%	41,02% (8,2%)	28,2
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	N/A	N/A	8 Jejaring	8 Jejaring (20%)	100	8 Jejaring	8 Jejaring (20%)	40

	Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minima	N/A	N/A	7 Lembaga	8 Lembaga (20%)	114,28	7 Lembaga	6 Lembaga (17,14%)	37,14
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	N/A	N/A	0,012%	0,028% (20%)	233,33	0.012%	0,010% (16,66%)	36,66
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	N/A	N/A	2 Kegiatan	2 Kegiatan (20%)	100	N/A	N/A	20
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	N/A	N/A	100%	100% (20%)	100%	N/A	N/A	20

2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	N/A	N/A	100%	100% (20%)	100	100%	35% (7%)	27
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA									
		Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	N/A	N/A	100%	100% (20%)	100	100%	100% (20%)	40%
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	N/A	N/A	177 kelurahan	177 kelurahan (20%)	100	N/A	N/A	20
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT									
		Cakupan pemberdayaan	N/A	N/A	100%	100% (20%)	100	100%	51,51% (10,30%)	30,30

		lembaga kemasyarakatan								
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan	N/A	N/A	177 Kelurahan	177 kelurahan (20%)	100	177 Kelurahan	177 Kelurahan (20%)	40
			N/A	N/A				177 Kelurahan		

Sumber:bappeda.semarangkota.go.id per triwulan II

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 OPD Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 2 Urusan, 9 Program dan 11 Indikator Kinerja Program dan 24 Kegiatan dengan 24 indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 11 Indikator Kinerja Program, semuanya memenuhi target yang telah ditetapkan.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 Urusan, 9 Program dengan 11 indikator kinerja program.
 - b) Dari 11 Indikator Kinerja Program, terdapat 3 Indikator memenuhi target, dan 8 Indikator yang masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan PD Kota Semarang Tahun 2022

No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Murni	Perubahan	SPJ		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
	2.8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	17,318,145,000	14,648,241,891	13,300,528,174	90,80	100
I	2.8.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,596,205,000	9,220,621,984	8,801,051,760	95.45	100
1	2.8.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,309,966	4,895,560	4,160,590	84.99	100
	2.8.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	589,578	358,320	351,550	98.11	100
	2.8.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	739,470	1,546,300	1,514,880	97.97	100
	2.8.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	872,616	519,800	513,100	98.71	100
	2.8.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	739,470	662,700	169,000	25.50	100
	2.8.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	872,616	519,800	485,800	93.46	100
	2.8.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	989,016	987,200	933,120	94.52	100
	2.8.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	507,200	301,440	193,140	64.07	100
2	2.8.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,129,203,360	7,219,343,838	7,077,984,232	98.04	100
	2.8.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,887,320,000	6,978,660,478	6,858,941,252	98.28	100
	2.8.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	239,741,000	238,541,000	216,911,000	90.93	100
	2.8.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	494,508	494,508	494,050	99.91	100
	2.8.1.2.02.6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	494,000	494,000	494,000	100.00	100
	2.8.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	824,180	824,180	816,680	99.09	100
	2.8.1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	329,672	329,672	327,250	99.27	100
3	2.8.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	360,510,000	243,770,080	223,542,875	91.70	100
	2.8.1.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60,510,000	43,770,080	40,277,500	92.02	100

No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Murni	Perubahan	SPJ		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
	2.8.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300,000,000	200,000,000	183,265,375	91.63	100
4	2.8.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,297,504,674	901,047,146	738,240,874	81.93	100
	2.8.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	2,500,000	2,500,000	2,460,500	98.42	100
	2.8.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,219,000	3,275,650	2,800,000	85.48	100
	2.8.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30,000,000	25,755,840	20,484,500	79.53	100
	2.8.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91,963,000	84,560,550	74,379,840	87.96	100
	2.8.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,434,674	21,276,329	13,509,420	63.50	100
	2.8.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	65,066,000	24,066,000	14,458,700	60.08	100
	2.8.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	868,322,000	490,444,137	375,816,704	76.63	100
	2.8.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200,000,000	249,168,640	234,331,210	94.05	100
5	2.8.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57,669,000	89,298,820	87,378,055	97.85	100
	2.8.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	16,401,000	16,401,000	16,287,030	99.31	100
	2.8.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,857,000	12,857,000	11,833,935	92.04	100
	2.8.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28,411,000	60,040,820	59,257,090	98.69	100
6	2.8.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320,198,000	320,198,000	280,127,053	87.49	100
	2.8.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114,992,000	114,992,000	85,203,157	74.09	100
	2.8.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205,206,000	205,206,000	194,923,896	94.99	100
7	2.8.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425,810,000	442,068,540	389,618,081	88.14	100
	2.8.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	248,728,000	248,728,000	208,134,000	83.68	100
	2.8.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	81,373,000	81,373,000	75,296,285	92.53	100

No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Murni	Perubahan	SPJ		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	2.8.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39,755,000	48,134,080	44,951,467	93.39	100
	2.8.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26,454,000	49,415,420	46,911,329	94.93	100
	2.8.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29,500,000	14,418,040	14,325,000	99.35	100
II	2.8.2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1,050,000,000	956,461,200	878,654,816	91.87	100
8	2.8.2.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	205,000,000	150,936,200	130,774,172	86.64	100
	2.8.2.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	121,400,000	92,915,000	77,366,300	83.27	100
	2.8.2.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	8,600,000	3,435,000	2,980,100	86.76	100
	2.8.2.2.01.3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	65,000,000	51,386,200	48,177,772	93.76	100
	2.8.2.2.01.4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	10,000,000	3,200,000	2,250,000	70.31	100
9	2.8.2.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	95,000,000	95,000,000	85,531,544	90.03	100
	2.8.2.2.02.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	10,000,000	10,000,000	8,102,000	81.02	100
	2.8.2.2.02.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	85,000,000	85,000,000	77,429,544	91.09	100
10	2.8.2.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	750,000,000	710,525,000	662,349,100	93.22	100
	2.8.2.2.03.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	425,000,000	385,525,000	367,032,020	95.20	100
	2.8.2.2.03.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	300,000,000	300,000,000	271,942,080	90.65	100
	2.8.2.2.03.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25,000,000	25,000,000	23,375,000	93.50	100

No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Murni	Perubahan	SPJ		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
III	2.8.3	Program Perlindungan Perempuan	2,706,492,600	1,847,266,588	1,437,012,753	77.79	100
11	2.8.3.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	467,991,600	107,789,668	82,220,400	76.28	100
	2.8.3.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	285,853,600	85,173,358	62,518,300	73.40	100
	2.8.3.2.01.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	182,138,000	22,616,310	19,702,100	87.11	100
12	2.8.3.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1,590,300,000	1,241,265,520	968,498,436	78.03	100
	2.8.3.2.02.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1,400,000,000	1,153,758,200	963,462,136	83.51	100
	2.8.3.2.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	190,300,000	87,507,320	5,036,300	5.76	100
13	2.8.3.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	648,201,000	498,211,400	386,293,917	77.54	100
	2.8.3.2.03.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	98,201,000	98,201,000	44,779,517	45.60	100
	2.8.3.2.03.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	300,000,000	174,110,400	143,492,600	82.41	100
	2.8.3.2.03.3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	25,000,000	900,000	900,000	100	100
	2.8.3.2.03.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	225,000,000	225,000,000	197,121,800	87.61	100
IV	2.8.4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1,940,001,000	1,615,496,770	1,403,540,832	86.88	100
14	2.8.4.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)	83,922,000	83,922,000	65,106,000	77.58	100

No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Murni	Perubahan	SPJ		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
		dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	2.8.4.2.01.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10,000,000	10,000,000	9,530,000	95.30	100
	2.8.4.2.01.2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10,000,000	10,000,000	6,500,000	65.00	
	2.8.4.2.01.3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	63,922,000	63,922,000	49,076,000	76.77	100
15	2.8.4.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,800,000,000	1,475,495,770	1,291,045,732	87.50	100
	2.8.4.2.02.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,000,000,000	898,998,470	838,586,660	93.28	100
	2.8.4.2.02.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	600,000,000	418,872,300	344,269,072	82.19	100
	2.8.4.2.02.3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000	157,625,000	108,190,000	68.64	100
16	2.8.4.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	56,079,000	56,079,000	47,389,100	84.50	100
	2.8.4.2.03.1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	56,079,000	56,079,000	47,389,100	84.50	100
V	2.8.5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	185,050,000	163,399,940	159,078,700	97.36	100
17	2.8.5.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	185,050,000	163,399,940	159,078,700	97.36	100
	2.8.5.2.01.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	105,050,000	80,400,000	77,615,800	96.54	100

No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Murni	Perubahan	SPJ		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
	2.8.5.2.01.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	80,000,000	82,999,940	81,462,900	98.15	100
VI	2.8.6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	399,280,000	315,948,200	279,055,413	88.32	100
18	2.8.6.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	230,825,000	180,434,100	165,771,220	91.87	100
	2.8.6.2.01.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	103,550,000	87,500,000	82,865,400	94.70	100
	2.8.6.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	127,275,000	92,934,100	82,905,820	89.21	100
19	2.8.6.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	168,455,000	135,514,100	113,284,193	83.60	100
	2.8.6.2.02.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	75,000,000	42,059,100	32,598,693	77.51	100
	2.8.6.2.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61,955,000	61,955,000	52,175,000	84.21	100
	2.8.6.2.02.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15,000,000	15,000,000	14,000,000	93.33	100
	2.8.6.2.02.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16,500,000	16,500,000	14,510,500	87.94	100
VII	2.8.7	Program Perlindungan Khusus Anak	441,116,400	529,047,209	342,133,900	64.67	100
20	2.8.7.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	165,226,400	132,950,160	121,446,800	91.35	100
	2.8.7.2.01.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20,000,000	10,000,160	8,975,000	89.75	100
	2.8.7.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	145,226,400	122,950,000	112,471,800	91.48	100
21	2.8.7.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	165,420,000	253,136,679	88,277,600	34.87	100

No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Murni	Perubahan	SPJ		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
		Kabupaten/Kota					
	2.8.7.2.02.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000	25,000,000	21,075,000	84.30	100
	2.8.7.2.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100,420,000	188,136,680	30,902,600	16.43	100
	2.8.7.2.02.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	20,000,000	20,000,000	17,815,000	89.08	100
	2.8.7.2.02.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	20,000,000	19,999,999	18,485,000	92.43	100
22	2.8.7.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110,470,000	142,960,370	132,409,500	92.62	100
	2.8.7.2.03.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40,000,000	28,097,800	25,283,000	89.98	100
	2.8.7.2.03.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40,470,000	100,283,800	94,688,000	94.42	100
	2.8.7.2.03.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30,000,000	14,578,770	12,438,500	85.32	100
	2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,169,753,000	1,890,804,641	1,755,352,555	92.83	100
VIII	2.13.4	Program Administrasi Desa	281,900,000	509,807,700	485,378,880	95.21	100
23	2.13.4.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	281,900,000	509,807,700	485,378,880	95.21	100
	2.13.4.2.01.1 1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	50,000,000	50,000,000	46,963,100	93.93	100
	2.13.4.2.01.1 8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	231,900,000	459,807,700	438,415,780	95.35	100
IX	2.13.5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	887,853,000	1,380,996,941	1,269,973,675	91.96	100

No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Murni	Perubahan	SPJ		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
24	2.13.5.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat	887,853,000	1,380,996,941	1,269,973,675	91.96	100
	2.13.5.2.01.2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	113,409,000	166,551,260	150,413,500	90.31	100
	2.13.5.2.01.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	105,883,000	105,883,000	87,292,072	82.44	100
	2.13.5.2.01.6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	149,437,000	43,569,880	29,898,000.00	68.62	100
	2.13.5.2.01.7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	519,124,000	1,064,992,801	1,002,370,103	94.12	100
		Total Keseluruhan	18,487,898,000	16,539,046,532	15,055,880,729	91.03	100

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 9 program dan 24 kegiatan pada OPD Kota Semarang adalah sebesar Rp 16.539.046.532,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 15.055.880.729,- dengan sisa sebesar Rp 1.483.165.803 (8,97%) dengan uraian berikut:

- Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar Rp.7.221.580.478,- realisasi Rp.7.079.181.252,- dan sisa anggaran sebesar Rp.142.399.226,-
- Belanja Langsung**, anggaran sebesar Rp.9.317.466.054,- Dengan realisasi sebesar Rp.7.976.699.477,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.340.766.577

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah untuk membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tabel berikut

Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Semarang Sampai Dengan Tahun 2022

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				Realisasi		Proyeksi
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
TUJUAN RENSTRA									
Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	Persentase impelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	62,72	64,58	66,34	68,10	70,59	70,59	72,30
Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	90	91	92	93	92,46	100	100

Masyarakat dalam Pembangunan									
SASARAN RENSTRA									
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	%	100	100	100	100	100	58,11	100
	Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	%	51,24	51,27	51,29	51,32	51,30	51,30	51,30
	Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga	Kelurahan	50	75	100	150	60	65	100
	Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100

Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	Point	701	801	801	801	744,4	744,4	801
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Point	70.10	70.40	70.70	71.00	76.71	76.71	77.89
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	%	100	100	100	100	100	100	100

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak” dan “Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan”** memiliki 3 indikator kinerja yaitu “Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan”, “Indeks Perlindungan Anak (IPA)” dan “Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan” telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sesuai dengan target.
- b. Adapun Sasaran Renstra Sebagai Berikut :
 - 1) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.
 - 2) Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.
 - 3) Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.
 - 4) Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, di Kota Semarang di mana capaian tahun 2022 sudah sejalan dengan Renstra.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan fungsinya di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4**Pencapaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Sampai Dengan Tahun 2023****Kota Semarang**

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	100%	100%	100%	58,11%	100%	100%
2	Prosentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%
3	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	68,75%	100%	100%

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, indikator tersebut di atas merupakan indikator capaian yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Selain dari aspek Pencapaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Kota Semarang , aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah di Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Anak sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5**Pencapaian Indikator Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Anak Sampai Dengan Tahun 2023**

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	15,64	14,24	12,84	11,44	25,46	12,42	15,64	14,24%

2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,012%	0,012%	0,011%	0,011%	0,028%	0,010%	0,012%	0,012%
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, indikator tersebut di atas juga merupakan indikator capaian yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan fungsinya di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	51,51%	100%	100%

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait langsung dengan fungsinya di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	TARGET RENSTRA				REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR										
Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak										
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	7,00%	7,65%	7,80%	7,95%	59,38%	59,38%	75%	100%	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,012%	0,012%	0,011%	0,011%	0,028%	0,010%	0,012%	0,012%	
8	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	15,64	14,24	12,84	11,44	25,46	12,42	15,64	14,24%	
9	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,69	74,69	74,71	74,71	73,64	73,93	74,71	74,71	
11	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	62,72	64,58	66,34	68,1	70,59	70,59	72,00	72,00	
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1	Persentase LPM Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas,

dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja Persentase ARG pada belanja langsung APBD pada tahun 2022 adalah sebesar 59,37%. Dengan adanya kenaikan ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan APBD Kota Semarang tahun 2022 telah menerapkan Anggaran Responsif Gender.
2. Capaian indicator kinerja Persentase anak korban kekerasan yang ditangani pada tahun 2022 adalah sebesar 0,027% dengan perhitungan sebagai berikut

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani}}{\text{Jumlah anak (Penduduk usia kurang dari 18 th)}} \times 100\% \quad (\text{DO PERMENDAGRI No.18 Tahun 2020}) \\ & \frac{136 \text{ (sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 2022)}}{480.249 \text{ (sumber : dispendukcapil, 2021)}} \times 100\% \\ & = 0,028\% \end{aligned}$$

3. Capaian indikator kinerja Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO di tahun 2022 ini dengan jumlah sebesar 25,46 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000 \quad (\text{DO PERMENDAGRI No.18 Tahun 2020}) \\ & \frac{217 \text{ (sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 2022)}}{852.284 \text{ (sumber : dispendukcapil, Juni 2022)}} \times 100.000 \\ & = 25,46 \end{aligned}$$

Dengan indikator tersebut semua perempuan korban kekerasan termasuk TPPO sudah tertangani semua dan mendapatkan layanan komprehensif dari DP3A Kota Semarang dan capaian indicator kinerja terealisasi 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

4. Capaian indicator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) adalah 73,93 dan Indeks Perlindungan Anak (IPA) masih menggunakan angka di tahun 2021 sebesar 70,59.
5. Capaian indicator kinerja Rasio KDRT pada tahun 2022 adalah terealisasi sebesar 0,025% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah kasus KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\% \\ & \frac{115 \text{ (sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 2022)}}{454.134 \text{ (sumber : disdaldukkb, 2022)}} \times 100\% \\ & = 0,025\% \end{aligned}$$

Adapun kasus KDRT pada tahun 2022 sudah tertangani semua oleh DP3A Kota Semarang dengan baik (100%).

6. Capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) aktif berhasil mencapai target 100%. LPM yang aktif tersebut adalah RT, RW, PKK,

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya:

- a. Masih kurangnya kegiatan yang menunjang pemberdayaan perempuan;
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya ketahanan keluarga;
- c. Belum efektifnya Forum Anak sebagai wadah fasilitasi partisipasi anak dalam penentuan kebijakan public;
- d. Masih kurangnya komitmen terkait pemenuhan hak anak dari stakeholder;
- e. Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan;
- f. Masih kurangnya pemahaman mengenai fungsi lembaga kemasyarakatan.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan program dan advokasi kebijakan terkait pemberdayaan, pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan serta penguatan ketahanan keluarga dan data;
- b. Meningkatkan program, kebijakan dan sinergitas terkait Pemenuhan Hak dan layanan perlindungan khusus Anak;
- c. Mengoptimalkan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- d. Meningkatkan program dan advokasi kebijakan terkait peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan OPD, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan;

- b. Belum optimalnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak;
- c. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak yang didukung dengan penyampaian data dan informasi yang akurat;
- d. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO;
- e. Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat Kota Semarang dalam Penggalan Potensi SDA dan Penerapan TTG;
- g. Masih Lemahnya Jejaring Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
- h. Masih Rendahnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan;
- i. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2024 merupakan tahun ke tiga dari pelaksanaan RPJMD. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 adalah “Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
- e. Prioritas Daerah 5: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus :

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
- b. Peningkatan nilai investasi;
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
- d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
- e. Pengembangan ekonomi hijau (green economy);
- f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:

- a. Melaksanakan operasi pasar murah;
- b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
- c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
- d. Gerakan menanam;
- e. Merealisasikan BTT;
- f. Dukungan transportasi dari APBD;
- g. Rapat teknis TPID;
- h. Pemantauan harga dan stok;
- i. Menjaga pasokan;
- j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
- k. Bantuan sosial

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:

- 1) Administrasi kependudukan;
- 2) Bantuan sembako;
- 3) Jaminan kesehatan;
- 4) Penanganan stunting & gizi buruk;
- 5) Alat bantu penyandang disabilitas;
- 6) Pelayanan pendidikan;
- 7) Rehab rumah tidak layak huni;
- 8) Sanitasi permukiman;
- 9) Sumber air bersih;
- 10) Pelayanan ketenagakerjaan;
- 11) Pemberdayaan UMKM;
- 12) Pelayanan keluarga berencana;
- 13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*;
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya unggulan Prioritas-3, Penanganan Stunting:

1) Sensitif

- Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
- Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
- Penanganan Kawasan Kumuh;
- Pemberdayaan Ekonomi.

2) Spesifik

- Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
- PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
- PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
- f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:

- 1) Tanggul Tambaklorok;
- 2) Sungai Plumbon;
- 3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas-5:

- 1) *Smart City*;
- 2) Penguatan Inovasi;
- 3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00

- Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas kedua yaitu **“Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem”** dan prioritas ketiga yaitu **Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif.**

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Semarang
Tahun 2023

42

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPJPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPJPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan	1.000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	12 Laporan	1.000,000	DINAS PEMERIKAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100 %	8,564,755,322						100 %	8,086,895,588	
2	08	01	2.02	01	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		41 Orang/bulan	8,322,805,322	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	41 Orang/bulan	8,738,945,588	DINAS PEMERIKAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.02	02	Persediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Persediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	240,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	1 Dokumen	246,000,000	DINAS PEMERIKAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan	500,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	2 Laporan	500,000	DINAS PEMERIKAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.02	06	Pengetahuan dan Penyipahan Tanggapan Pemantauan	Jumlah Dokumen Rahan Tanggapan Pemantauan dan Tidak Lanjut Pemantauan		1 Dokumen	500,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	1 Dokumen	500,000	DINAS PEMERIKAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		14 Laporan	700,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	14 Laporan	700,000	DINAS PEMERIKAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	250,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	1 Dokumen	250,000	DINAS PEMERIKAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya	%	100 %	60,000,000						100 %	60,000,000	
2	08	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	50,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang dan Masyarakat	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMERIKAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan		400 Orang	10,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang dan Masyarakat	400 Orang	10,000,000	DINAS PEMERIKAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	%	100 %	1,006,165,678						100 %	718,105,412	
2	08	01	2.06	01	Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	2,500,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	1 Paket	3,000,000	DINAS PEMERIKAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.06	02	Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	8,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	1 Paket	8,000,000	DINAS PEMERIKAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.06	03	Persediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket	10,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	3 Paket	12,000,000	DINAS PEMERIKAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.06	04	Persediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	60,665,678	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	4 Paket	70,105,412	DINAS PEMERIKAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.06	05	Persediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		3 Paket	25,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	3 Paket	25,000,000	DINAS PEMERIKAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		12 Laporan	50,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	12 Laporan	100,000,000	DINAS PEMERIKAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20 Laporan	650,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	20 Laporan	300,000,000	DINAS PEMERIKAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		5 Dokumen	200,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	5 Dokumen	200,000,000	DINAS PEMERIKAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedanya peralatan dan perlengkapan kantor	%	100 %	70,000,000						100 %	300,000,000	
2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit	50,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	2 Unit	100,000,000	DINAS PEMERIKAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	10,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	1 Unit	100,000,000	DINAS PEMERIKAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 Unit	10,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	5 Unit	100,000,000	DINAS PEMERIKAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedanya kebutuhan jasa kantor	%	100 %	350,000,000						100 %	365,000,000	
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	120,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	36 Laporan	125,000,000	DINAS PEMERIKAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	230,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	12 Laporan	240,000,000	DINAS PEMERIKAAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset dinas	%	100 %	410,300,000						100 %	438,800,000	

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 08 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Paket Kendaraan Persewaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Persewaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya				1 Unit	238,800,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DPJA Kota Semarang	1 Unit	238,800,000	DINAS PEMERIDAWAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paket dan Persewaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakai dan Persewaannya				27 Unit	90,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DPJA Kota Semarang	27 Unit	90,000,000	DINAS PEMERIDAWAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	40,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DPJA Kota Semarang	10 Unit	40,000,000	DINAS PEMERIDAWAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DPJA Kota Semarang	1 Unit	40,000,000	DINAS PEMERIDAWAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	16,500,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Penwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DPJA Kota Semarang	10 Unit	30,000,000	DINAS PEMERIDAWAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMERIDAWAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persem		Persem	100.00 Persem	1,096,600,000						100.00 Persem	1,392,000,000	
2 08 02 2.01	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender			Program/Kegiatan		145,000,000						93 Program/Kegiatan	260,000,000	
2 08 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	30,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompetisi dan produktif	Masyarakat	2 Dokumen	60,000,000	DINAS PEMERIDAWAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	15,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompetisi dan produktif	Masyarakat	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMERIDAWAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk Perencanaan Responsif Gender (PRRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Perangkat Daerah	70,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompetisi dan produktif	Masyarakat	30 Perangkat Daerah	100,000,000	DINAS PEMERIDAWAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk Perencanaan Responsif Gender (PRRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Perangkat Daerah	30,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompetisi dan produktif	Masyarakat	30 Perangkat Daerah	50,000,000	DINAS PEMERIDAWAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Persewaan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi perempuan	%	%	100 %		130,000,000						100 %	160,000,000	
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	30,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompetisi dan produktif	Masyarakat	2 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMERIDAWAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Organisasi	100,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompetisi dan produktif	Masyarakat	25 Organisasi	110,000,000	DINAS PEMERIDAWAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.03	Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat perhatian	Lembaga		Lembaga	30 Lembaga	821,000,000						30 Lembaga	972,000,000	
2 08 02 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				25 Lembaga	465,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompetisi dan produktif	DPJA Kota Semarang	25 Lembaga	500,000,000	DINAS PEMERIDAWAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				50 Orang	320,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompetisi dan produktif	DPJA Kota Semarang	50 Orang	340,000,000	DINAS PEMERIDAWAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia				1 Dokumen	36,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompetisi dan produktif	DPJA Kota Semarang	1 Dokumen	132,000,000	DINAS PEMERIDAWAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kelelahan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	point		point	14.24 point	2,252,033,000						14.24 point	1,572,414,000	
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	302,033,000						6 Dokumen	20,000,000	
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	150,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompetisi dan produktif	Masyarakat	2 Dokumen	10,000,000	DINAS PEMERIDAWAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode				Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah				
2	08	03	2.01	02	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Layanan Perindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			30 Perangkat Daerah	152.033.000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	30 Perangkat Daerah	10.000.000	DINAS PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutn bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	%	100 %	1,500,000,000						100 %	1,512,414,000	
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengujian Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengujian			100 Orang	1,400,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	100 Orang	1,502,214,000	DINAS PEREMBUAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutn bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengujian yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			100 Layanan	100,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	100 Layanan	10,000,000	DINAS PEREMBUAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang terstandarisasi	%	%	100 %	450,000,000						100 %	40,000,000	
2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			12 Dokumen	150,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	DP3A Kota Semarang	12 Dokumen	10,000,000	DINAS PEREMBUAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perindungan Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia lembaga Penyedia Layanan Perindungan Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan			1630 Orang	100,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	DP3A Kota Semarang	1630 Orang	10,000,000	DINAS PEREMBUAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik			3 Orang	100,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	DP3A Kota Semarang	3 Orang	10,000,000	DINAS PEREMBUAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			4 Dokumen	100,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	DP3A Kota Semarang	4 Dokumen	10,000,000	DINAS PEREMBUAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	Persen	Persen	100,00 Persen	1,930,000,000						100,00 Persen	2,180,000,000	
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan peningkatan kualitas keluarga	%	%	100 %	30,000,000						100 %	30,000,000	
2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			16 Perangkat Daerah	10,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Prioritas Daerah 3, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	16 Perangkat Daerah	10,000,000	DINAS PEREMBUAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			1 Dokumen	10,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Prioritas Daerah 3, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	1 Dokumen	10,000,000	DINAS PEREMBUAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	10,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Prioritas Daerah 3, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	1 Dokumen	10,000,000	DINAS PEREMBUAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas penguatan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	%	%	100 %	1,800,000,000						100 %	2,000,000,000	
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan			1 Lembaga	1,000,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	1 Lembaga	1,050,000,000	DINAS PEREMBUAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			150 Orang	600,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	150 Orang	700,000,000	DINAS PEREMBUAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Dokumen	200,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	2 Dokumen	250,000,000	DINAS PEREMBUAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender	%	%	100 %	100,000,000						100 %	150,000,000	
2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			2 Layanan	100,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	2 Layanan	150,000,000	DINAS PEREMBUAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistim data gender dan anak	Persen	Persen	100,00 Persen	195,000,000						100,00 Persen	270,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah				
2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	195,000,000					2 Kegiatan	270,000,000		
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia			2 Dokumen	115,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Mayarakat	2 Dokumen	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Dokumen	80,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkarya Sain	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Mayarakat	2 Dokumen	120,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	Persen	Persen	100.00 Persen	397,500,000						100.00 Persen	550,000,000	
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring kewibnasan lembaga PHA	Jejaring	Jejaring	8 Jejaring	250,000,000						8 Jejaring	250,000,000	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			7 Organisasi	150,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Mayarakat	7 Organisasi	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Dokumen	100,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Sain	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Mayarakat	2 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga	Lembaga	7 Lembaga	147,500,000						7 Lembaga	300,000,000	
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			400 Orang	75,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Mayarakat	400 Orang	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kaalitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4 Dokumen	20,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Mayarakat	4 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			4 Dokumen	30,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Mayarakat	4 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			6 Dokumen	22,500,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Mayarakat	6 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani	Persen	Persen	0.01 Persen	275,000,000						0.01 Persen	480,000,000	
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kekerasan terhadap anak termasuk TPPO yang terlayani	%	%	100 %	45,000,000						100 %	50,000,000	
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			30 Perangkat Daerah	35,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Mayarakat	30 Perangkat Daerah	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			7 Dokumen	10,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Mayarakat	7 Dokumen	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan	%	%	100 %	120,000,000						100 %	200,000,000	
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			72 Orang	35,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Mayarakat	72 Orang	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			37 Layanan	10,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisk	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Mayarakat	37 Layanan	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Dokumen	40,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Mayarakat	2 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Dokumen	35,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Mayarakat	2 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	%	100 %	110,000,000						100 %	230,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Daerah					
2	08	07	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Dokumen	45,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Prioritas Daerah 3, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saling, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	2 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMERODAWAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Dokumen	35,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus: Dana Alokasi Khusus Non Fisk	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Prioritas Daerah 3, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saling, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	2 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMERODAWAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Dokumen	30,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Prioritas Daerah 3, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saling, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	2 Dokumen	80,000,000	DINAS PEMERODAWAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERODAWAAN MASYARAKAT DAN DESA					1,015,000,000						1,281,000,000		
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	Persen		Persen	100.00 Persen	275,000,000					100.00 Persen	330,000,000	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan	%		%	100 %	275,000,000					100 %	330,000,000	
2	13	04	2.01	11	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			1 Dokumen	50,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerataan	Prioritas Daerah 3, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saling, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMERODAWAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	04	2.01	18	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			2 Dokumen	225,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerataan	Prioritas Daerah 2, Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat	2 Dokumen	230,000,000	DINAS PEMERODAWAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	05			PROGRAM PEMERODAWAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen		Persen	100.00 Persen	740,000,000					100.00 Persen	951,000,000	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Facilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan	Kelurahan		Kelurahan	177 Kelurahan	740,000,000					177 Kelurahan	951,000,000	
2	13	05	2.01	02	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kerebaganan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kerebaganan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			2 Dokumen	200,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerataan	Prioritas Daerah 2, Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat	2 Dokumen	270,000,000	DINAS PEMERODAWAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kerebaganan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			4 Lembaga	115,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerataan	Prioritas Daerah 2, Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat	4 Lembaga	125,000,000	DINAS PEMERODAWAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	05	2.01	06	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			2 Laporan	100,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerataan	Prioritas Daerah 2, Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat	2 Laporan	161,000,000	DINAS PEMERODAWAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	05	2.01	07	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			2 Laporan	325,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerataan	Prioritas Daerah 2, Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Masyarakat	2 Laporan	395,000,000	DINAS PEMERODAWAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TOTAL										17,629,254,000							18,602,015,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun sebelumnya, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat atau para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

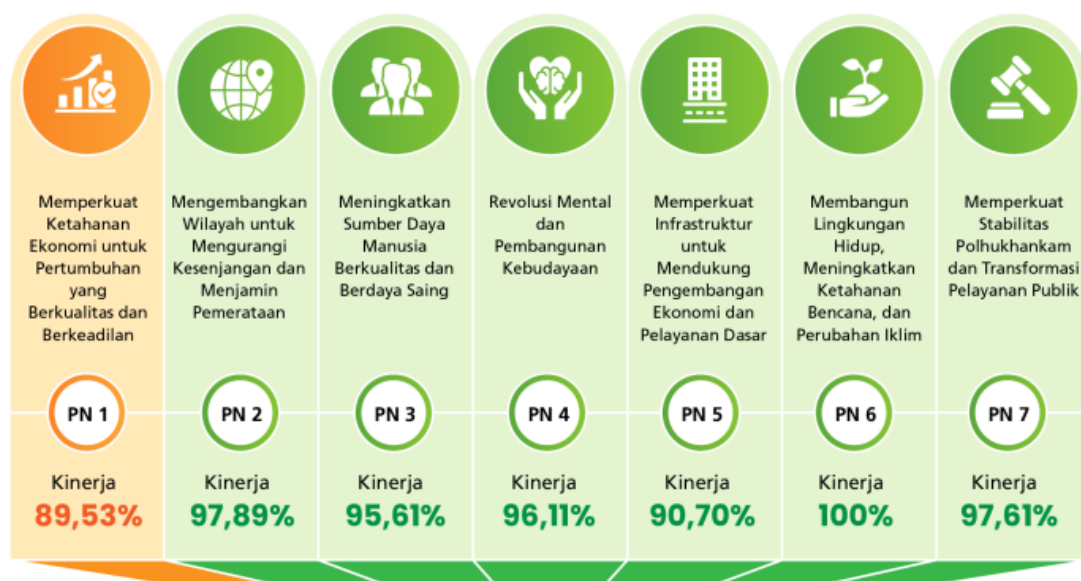
Khusus untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat atau para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang beserta tanggapannya telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 ada 7 (tujuh) Program Prioritas Tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar 3.1. Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Kinerja Efektivitas Sasaran Pembangunan
(Bappenas, 2023)

Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”** dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024.

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia**
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. **Pembangunan Infrastruktur**
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi**
Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi**
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi**
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan di tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas guna transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
5. Penguatan daya saing usaha;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”**. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Bila disandingkan dengan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2024 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1

Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemprov. Jateng dan Kota Semarang Tahun 2024

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Pusat	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator-indikator Kota Semarang diatas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional terkecuali pada TPT yang perlu ditingkatkan dalam penangananya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjaminkeselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024, yaitu :

“Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak”,

dan

“Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan”

dengan indikator tujuan sebagai berikut:

- a. Persentase implelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan
- b. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
- c. Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yaitu *“Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga”, “Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak”, “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”, dan “Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang”,* dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan
- b. Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan
- c. Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga
- d. Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan
- e. Peringkat Kota Layak Anak (KLA)
- f. Nilai SAKIP
- g. Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1

**Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4		5	6
1	Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak			1	Persentase impelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	%	100
				2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	66,34
		1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	1	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	%	100
				2	Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	%	51,29

				3	Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga	Kelurahan	100
				4	Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan	%	100
		2	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak		Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	Point	801
		3	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah		Nilai SAKIP	Point	70.70
2	Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan				Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	92
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang		Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	%	100

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 8 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 7 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 21 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 14 kegiatan pelaksanaan/pembangunan.

3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp.24.853.197.259 yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang, dengan perincian:
 - a. Rp.14.324.076.794,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp.10.529.120.465,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan
Maju Tahun 2024 Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.2.13.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				24.853.197.259				19.910.999.000
3.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				22.994.211.744				18.480.999.000
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A		100%	14,324,076,794				10.865.021.000
		Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A		100%					
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A		100%					
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100%					

2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan		27 Dokumen	160.197.400				14.600.000
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DP3A Kota Semarang	6 Dokumen	125.691.000				7.800.000
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DP3A Kota Semarang	1 Dokumen	2.586.000				1.000.000
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DP3A Kota Semarang	1 Dokumen	3.036.000				1.000.000
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DP3A Kota Semarang	2 Dokumen	1.379.200				1.000.000
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DP3A Kota Semarang	1 Dokumen	1.012.000				1.000.000
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DP3A Kota Semarang	6 Laporan	3.596.800				1.800.000

2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP3A Kota Semarang	12 Laporan	22.896.400				1.000.000
2.08.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan</i>		100%	9.918.108.345				9.235.015.588
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DP3A Kota Semarang	50 Orang/bulan	9.671.520.000				8.986.865.588
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DP3A Kota Semarang	1 Dokumen	242.578.745				246.000.000
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DP3A Kota Semarang	2 Laporan	1.124.000				500.000
2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	DP3A Kota Semarang	1 Dokumen	750.000				700.000
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DP3A Kota Semarang	14 Laporan	1.573.600				700.000
2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DP3A Kota Semarang	1 Dokumen	562.000				250.000
2.08.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur</i>		100%	382.600.000				60.000.000

2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DP3A Kota Semarang	1 Dokumen	132.600.000				50.000.000
2.08.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DP3A Kota Semarang	480 Orang	250.000.000				10.000.000
2.08.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan pelaksanaan administrasi umum</i>		100%	1.134.598.847				718.105.412
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DP3A Kota Semarang	1 Paket	5.355.300				3.000.000
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DP3A Kota Semarang	2 Paket	57.905.370				8.000.000
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DP3A Kota Semarang	2 Paket	29.997.620				12.000.000
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DP3A Kota Semarang	4 Paket	64.466.452				70.105.412
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DP3A Kota Semarang	3 Paket	20.175.425				25.000.000
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DP3A Kota Semarang	12 Laporan	48.000.000				100.000.000
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP3A Kota Semarang	20 Laporan	523.546.200				300.000.000
2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DP3A Kota Semarang	3 Dokumen	385.152.480				200.000.000

2.08.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>		100%	1.341.628.410				50.000.000
2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	DP3A Kota Semarang	10 Unit	933.780.000				0
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DP3A Kota Semarang	5 Unit	281.861.380				10.000.000
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DP3A Kota Semarang	5 Unit	112.361.790				20.000.000
2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DP3A Kota Semarang	1 Unit	13.625.240				20.000.000
2.08.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor</i>		100%	582.109.140				375.000.000
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DP3A Kota Semarang	36 Laporan	177.384.000				125.000.000
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DP3A Kota Semarang	12 Laporan	404.725.140				250.000.000
2.08.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemeliharaan aset dinas</i>		100%	804.834.652				412.300.000
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DP3A Kota Semarang	1 Unit	39.910.050				238.800.000

	Jabatan								
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DP3A Kota Semarang	30 Unit	442.264.410				90.000.000
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DP3A Kota Semarang	10 Unit	43.390.566				40.000.000
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DP3A Kota Semarang	2 Unit	243.102.165				25.000.000
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DP3A Kota Semarang	2 Unit	36.167.461				18.500.000
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		100%	1.488.449.604				1.365.000.000
2.08.02.2.01	<i>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender</i>		96 Program/Kegiatan	216.903.968				270.000.000
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan	Kota Semarang	1 Dokumen	33.766.450				65.000.000

		Kabupaten/Kota							
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1 Dokumen	54.244.530				35.000.000
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	4 Perangkat Daerah	70.029.658				120.000.000
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	46 Perangkat Daerah	58.863.330				50.000.000
2.08.02.2.02	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan partisipasi perempuan</i>		3 Organisasi	444.347.212				170.000.000

	<i>Kewenangan Kabupaten/Kota</i>								
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	5 Dokumen	63.278.642				50.000.000
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	25 Organisasi	381.068.570				120.000.000
2.08.02.2.03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan</i>		31 Lembaga	827.198.424				925.000.000
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kota Semarang	25 Lembaga	527.198.578				500.000.000
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Kota Semarang	200 Orang	160.539.028				350.000.000

	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas							
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Semarang	7 Dokumen	139.460.818				75.000.000
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani		0.011 %	2.547.556.594				3.260.978.000
		Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		12.84 point					
2.08.03.2.01	<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan</i>		4 Kegiatan	549.999.882				260.978.000
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	12 Dokumen	411.254.782				150.000.000
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	60 Perangkat Daerah	138.745.100				110.978.000

2.08.03.2.02	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan</i>		5 Lembaga	1.266.853.184				2.100.000.000
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kota Semarang	100 Orang	1.266.853.184				2.100.000.000
2.08.03.2.03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan</i>		26 Lembaga	730.703.528				900.000.000
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	2 Dokumen	253.882.570				250.000.000
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kota Semarang	297 Orang	130.105.119				250.000.000

2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Kota Semarang	5 Orang	176.828.359				200.000.000
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	19 Dokumen	169.887.480				200.000.000
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi		100%	2.561.500.000				2.230.000.000
2.08.04.2.01	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga</i>		2 Kegiatan	2.062.612.120				30.000.000
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	4 Perangkat Daerah	355.000.000				10.000.000
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan	Kota Semarang	30 Dokumen	81.500.000				10.000.000

		Kabupaten/Kota yang Tersedia							
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1 Dokumen	1.626.112.120				10.000.000
2.08.04.2.02	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga</i>		17 Kegiatan	470.551.180				2.050.000.000
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kota Semarang	3 Lembaga	73.217.800				1.000.000.000
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	16 Orang	373.887.880				800.000.000
2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Kota Semarang	1 Dokumen	23.445.500				250.000.000

	Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.04.2.03	<i>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender</i>		100%	28.336.700				150.000.000
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Semarang	1 Layanan	28.336.700				150.000.000
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak		100%	278.511.810				265.000.000
2.08.05.2.01	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak</i>		2 Kegiatan	278.511.810				265.000.000
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Semarang	2 Dokumen	99.118.300				145.000.000
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	3 Dokumen	179.393.510				120.000.000

2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak		100%	1.794.116.942				495.000.000
2.08.06.2.01	<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA</i>		9 Jejaring	395.000.000				250.000.000
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kota Semarang	3 Organisasi	65.000.000				150.000.000
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	6 Dokumen	330.000.000				100.000.000
2.08.06.2.02	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal</i>		9 Lembaga	1.399.116.942				245.000.000
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	50 Orang	841.156.942				100.000.000

2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	3 Dokumen	150.000.000				45.000.000
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	6 Dokumen	207.960.000				50.000.000
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	6 Dokumen	200.000.000				50.000.000
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.858.985.515				1.430.000.000
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi		100%	545.129.154				350.000.000
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan		177 Kelurahan	545.129.154				350.000.000

2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Kota Semarang	1 Dokumen	27.463.700				100.000.000
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Semarang	1 Dokumen	517.665.454				250.000.000
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		100%	1.313.856.361				1.080.000.000
2.13.05.2.01	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum A</i>	<i>Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan</i>		<i>177 Kelurahan</i>	<i>1.313.856.361</i>				<i>1.080.000.000</i>
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Semarang	2 Dokumen	348.427.510				300.000.000
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,	Kota Semarang	1 Lembaga	100.667.580				130.000.000

	Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya							
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Semarang	1 Laporan	104.068.520				200.000.000
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Semarang	4 Laporan	760.692.751				450.000.000

Sumber : DP3A Kota Semarang

BAB V PENUTUP

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

Semarang, 3 Juli 2023

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kota Semarang**



Drs. ULFI IMRAN BASUKI, M.Si

